

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK  
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA NETUTNANA  
KECAMATAN AMANATUN SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**Hendrikus Pous**

**Staf Pengajar pada Program Studi PPKN FKIP Undana**

**e-mail: [hendrikuspous@staf.undana.ac.id](mailto:hendrikuspous@staf.undana.ac.id)**

**Abstrak**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu analisis yang menggambarkan secara rinci hasil temuan lapangan yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Netutnana, Aparat desa serta Masyarakat desa Netutnana. Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Netutnana (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Netutnana. Hasil penelitian ini bahwa masyarakat masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Netutnana itu dilihat dari keterlibatan mereka yaitu: 1. Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan dimana masyarakat ikut serta merumuskan program serta memberikan ide, pendapat pada musyawarah yang sedang berlangsung, 2. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dimana masyarakat menyumbangkan tenaganya pada setiap program yang dilaksanakan, 3. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi yaitu masyarakat terlibat dalam tim pelaksana kegiatan yang dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu; 1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan partisipasi, 2. Usia dimana masyarakat yang sudah lanjut usia rentan tidak turut ikut berpartisipasi, 3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi.

**Kata kunci: Partisipasi, Penggunaan Dana Desa, Pemberdayaan**

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terdapat kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemberdayaan masyarakat dapat memandirikan masyarakat apabila program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Pembelajaran pada masyarakat yang dimaksud adalah program pemberdayaan dapat memberikan keterampilan maupun memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Utsman (2010: 29) mengatakan proses belajar pemberdayaan masyarakat yaitu suatu upaya penyadaran dan pembentukan perilaku menuju peningkatan kapasitas diri serta mampu bertransformasi menjadi lebih baik. Selain berorientasikan pada masyarakat pemberdayaan yang baik adalah apabila program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan secara penuh pada implikasi program pemberdayaan.

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan- kegiatan selanjutnya.

Partisipasi masyarakat Desa Netutnana relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk materi dan uang tunai.

Pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan di Desa Netutnana yakni pemberdayaan masyarakat yang dijalankan, sebagai perwujudan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa di masyarakat. Salah satu upayanya adalah menerapkan kerjasama masyarakat melalui program Anggaran Dana Desa dengan maksud meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat yang perlu segera dilaksanakan guna menghindari akibat yang lebih buruk dalam jangka panjang.

Namun kenyataan yang terjadi di Desa Netutnana adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat

sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pembangunan pada Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS sesuai judul penelitian yaitu : Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemeberdayaan Masyarakat di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS.

### **Subjek Penelitian**

Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Desa Aparat Desa serta Masyarakat pada Desa Netutnana adalah Orang-orang yang dianggap mengetahui perkembangan pada Desa Netutnana yang menjadi objek Penelitian dalam menggali informasi data dalam penelitian ini.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

### **Jenis Dan Sumber Data**

1. Jenis Data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk bukan angka. Jadi, data yang bukan kuantitatif atau bukan berbentuk bilangan disebut kualitatif ( Silalahi, 2010: 284)
2. Sumber Data. Lexy J. Moleong (1994:112 dalam Hudijono 2012:49) menjelaskan bahwa data utama dalam penelitian kuantatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.
  - a. Data primer. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Jadi yang menjadi data primer dari penelitian ini yang di peroleh dari narasumber yaitu: Jinsoniu Taniu (Kepal Desa), bapak Jonas Kebkole (tokoh masyarakat/Ketua RT/RW), dan bapak Sefriana Taneo (Ketua Penggerak PKK) yang mengerti dan tahu betul dan biasa terlibat langsung tentang proses pelaksanaan Partisipasi masyarakat di Desa Netutnana, guna memperoleh informasi tentang meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui dokumentasi dan wawancara.
  - b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau telaah gambar dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu: sejarah lokasi penelitian, data penduduk, keadaan mata penceharian, keadaan geografis, agama, dan peta Desa yang didapat dari buku desa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian initerdiri dari 3 macam yaitu:

1. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. (Moleong, 2006: 186).
2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa buku, foto, catatan

pribadi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan semua proses pada saat pengumpulan data di lapangan yaitu foto wawancara dengan Kepala Desa, Ketua RT/RW, Dan Ketua Penggerak PKK dan Masyarakat.

### **Teknik Analisis data**

Data yang telah didapatkan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yang terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data. Data yang diperoleh dari lapangan cukuplah banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan secara rinci. Seperti yang telah dikemukakan, makin lama penelitian di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan detail sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2012:338) Adapun data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Penyajian Data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mempermudah untuk dipahami. (Sugiyono, 2012: 341) Penyajian data yang diperoleh akan diorganisasikan dan disusun secara rapih dan terstruktur dan dapat membantu peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan tindakan yang berkaitan dengan penelitian tentang kajian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih kurang jelas atau gelap sehingga penelitian menjadi lebih jelas dan terarah, dapat berhubungan kasual, atau interaktif, teori, dan hipotesis.

Sesuai dengan langkah-langkah di atas pada akhirnya peneliti membahas secara kualitatif tentang hasil penelitian yang didapat. Yaitu hasil data yang telah dianalisis akan disimpulkan untuk penelitian tentang kajian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### **Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Menilai kualitas penelitian kualitatif secara eksplisit menawarkannya untuk alternatif dan kriteria yang lebih berorientasi kualitatif tradisional terbagi dalam empat kriteria. (Emzir, 2012: 79-81)

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*). Kriteria kredibilitas melibatkan penempatan hasil penelitian kualitatif yaitu kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif orang yang berpartisipasi dalam penelitian. Pada kriteria ini memiliki dua fungsi yakni: (1) melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. (2) menunjukkan hasil-hasil penemuan dengan suatu pembuktian dari peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Keteralihan (*transferability*). Kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau aturan yang lain. Sebagai contoh apakah data tentang Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa netutnana tersebut berjalan dengan baik atau tidak dan juga tepat sasaran atau malah sebaliknya.
3. Kebergantungan (*Dependability*). Kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Konsep kebergantungan lebih luas dari pada reliabilitas. Dengan demikian untuk dapat diketahui reliabilitas data tentang Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa netutnana akan dicapai dalam konteks

pemeriksaan data setelah penelitian dilakukan.

4. Kepastian (*Confirmability*). Penelitian kualitatif cenderung berasumsi bahwa setiap peneliti membawa sebuah perspektif yang unik ke dalam penelitian. Jadi suatu data objektif atau tidak tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang seperti kepastian terhadap data yang diperoleh oleh peneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari hasil data observasi, wawancara, maupun dokumentasi peneliti terhadap subjek yang diteliti, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan pada pembangunan dan bidang ekonomi.

### **1. Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa Netutnana Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan**

Proses Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadi langkah untuk meningkatkan Pemberdayaan pada masyarakat desa, dimana program pemberdayaan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pemberdayaan untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pelaksanaan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap-tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Netutnana sering mengalami tumpang tindih, dalam artian dalam sekali rapat pertemuan bersama warga bisa terjadi langsung beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Keunikan ini tentu dapat mengurangi efektifitas pertemuan yang dilaksanakan karena terlalu banyak informasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta tidak beraturan topik pembahasan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memilah informasi-informasi yang sesuai. Hal ini sesuai dengan penuturan.

Kurang transparannya pemerintah desa juga menjadi penyebab lain terkait kurangnya partisipasi penuh dalam partisipasi masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan pembangunan karena merasa sudah ada pembagian tugas dalam kegiatan pemberdayaan pemerintah desa.

- a. Tahap Perencanaan. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini perencanaan tahapan kegiatan yang dilakukan dari data hasil penelitian meliputi: Musyawarah dilaksanakan di kantor Desa untuk menentukan perencanaan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan di setiap ketua. Dalam musyawarah tersebut kepala desa yang menjadi pembicara awal pembukaan musyawarah atau rapat yang dilaksanakan dan diikuti oleh ketua BPD. Dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah jumlah dana Program Dana Desa, serta dilanjutkan dengan merencanakan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan setiap dusun dengan bertukar pendapat satu dengan yang lainnya. Dalam musyawarah perencanaan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan, dihadiri oleh kepala Desa, Sekretaris Desa, beserta para stafnya dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama anggotanya. Sementara dari data penelitian terbukti dalam proses perencanaan pemberdayaan peran serta masyarakat yang seharusnya sangat dibutuhkan agar pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, namun masyarakat tidak dilibatkan. Sementara seharusnya dalam tahapan perencanaan seharusnya bersifat partisipatif dimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan disamping pemerintahan desa sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Seharusnya dalam mekanisme perencanaan pemberdayaan masyarakat dimulai dari desa yaitu antara lain dengan memberi seluas-luasnya kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, kualitas pendapat dan usulan serta dokumen perencanaan yang diusulkan.

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan penggunaan dana desa agar berjalan dengan baik atau tidak, adalah :

Pertama, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan program tersebut. partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Netutnana, dimana masyarakat dilibatkan dalam percanaan pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran melalui rapat kecil yang dilaksanakan di rumah ketua program pemberdayaan supaya masyarakat mengetahui pemberdayaan apa saja yang akan dilakukan dan untuk memastikan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Tujuan dari kepala jaga untuk mengadakan rapat kecil supaya masyarakat mengetahui akan adanya pembangunan di lingkungan itu.

Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat akan program tersebut. Apakah itu selalu disesuaikan atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat. Ketika peneliti melakukan penelitian, pemanfaatan Program ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar program pemberdayaan dapat tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Maka proses musyawarah yang dilaksanakan benar-benar diperhitungkan secara matang dengan kebutuhan masyarakat.

Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan adalah tingkatan partisipasi masyarakat Desa Netutnana dalam mengikuti rapat penyusunan rencana kegiatan- kegiatan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa yang dinilai dari kehadiran dalam perencanaan, keaktifan dalam rapat dan kontrol dalam pengambilan keputusan tersebut.

Seharusnya tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan pemberdayaan Desa diawali dari sosialisasi pemberdayaan desa, menghadiri musyawarah perencanaan program pemberdayaan desa. Pengambilan keputusan untuk perencanaan program pemberdayaan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pemberdayaan yang menurut partisipan paling mendesak untuk disegerakan. Agar didapat prioritas rencana pemberdayaan ini tidak serta-merta berasal dari para usulan dari para stakeholder, tetapi juga harus berasal dari usulan seluruh kalangan masyarakat, dan dilanjutkan dengan rembug yang menghasilkan keputusan perencanaan yang paling diprioritaskan.

Dari data yang diperoleh di lapangan ternyata masyarakat merasa senang dan lebih dihargai jika dilibatkan dalam tahapan pengambilan keputusan mereka merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena diikutsertakan dalam proses perencanaan program pemberdayaan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum dilibatkan semuanya dalam tahapan pengambilan keputusan terkait rencana program pemberdayaan dana desa. Kinerja pemerintah desa Netutnana belum bisa dibilang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.

- b. Tahap Pelaksanaan Pemberdayaan. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

Seharusnya pelaksanaan kegiatan Program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana penglokasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pemberdayaan yang telah direncanakan.

Tahap implementasi pemberdayaan masyarakat desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pemberdayaan desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pemberdayaan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pemberdayaan. Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pemberdayaan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pemberdayaan masyarakat desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan

pemberdayaan yang ada di desa.

Dari hasil penelitian didapati bahwa banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam setiap program kegiatan dana desa alasannya bermacam-macam, ada yang beralasan karena ada pekerjaan utama sebagai PNS dan juga sebagai petani.

- c. Tahap Evaluasi Hasil Pemberdayaan. Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pemberdayaan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil pemberdayaan di Desa Netutnana. Penilaian hasil pemberdayaan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan masyarakat Desa Netutnana dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Sama halnya pada tahapan pengawasan, begitu juga yang terjadi di tahapan evaluasi, sepertinya tidak bisa dipungkiri lagi kalau budaya memberikan kritikan itu di Indonesia yang paling hebat. Di Desa Netutnana juga terjadi dimana setiap rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan. Masyarakat turut aktif dalam melakukan evaluasi kepada pemerintah, pemerintah desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat Kabupaten.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat**

Melihat dari hasil penelitian ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat pada setiap kegiatan program penggunaan dana desa. Seperti yang diungkapkan oleh Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu: Faktor internal dan Faktor eksternal

- a. Faktor Internal. Faktor internal mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman berkelompok.

Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu hal. Begitu juga dengan kemampuan setiap orang dalam memahami segala sesuatu yang dilihat dan di dengarnya, semua tergantung pada kemampuan masing-masing masyarakat dan tergantung minat serta keinginannya untuk mengetahuinya. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar Chaniago. (2002:427-428). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman tersebut yaitu:

- 1) Pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, baik pemberdayaan yang dilakukan pemerintah maupun yang swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi mereka mengerti tentang arti pentingnya pemberdayaan yang dilaksanakan sehingga mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pemberdayaan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti akan pentingnya pemberdayaan yang dilaksanakan. Akibat ketidaktahuan itulah maka timbul sikap kurang kepedulian masyarakat terhadap pemberdayaan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan.
- 2) Status Kependudukan. Semakin lama seseorang tinggal dalam lingkungan masyarakat semakin baik juga pengetahuannya mengenai lingkungannya dan lebih baik dalam penyesuaian terhadap lingkungannya. Begitu juga sebaliknya jika seseorang merupakan penduduk baru dalam suatu masyarakat, maka sulit juga untuknya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan pengamatan peneliti, di Desa Netutnana hanya beberapa orang penduduk pendatang yang menetap di desa, karena istri atau suaminya yang berasal dari desa dan suaminya dari luar dan sebaliknya.
- 3) Pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Netutnana adalah petani (ladang). Pekerjaan ini sangat menyita waktu masyarakat karena bila musim ladang pada pagi hari sudah beraktifitas dengan benar pulang pada siang atau sore hari, sehingga bilamana di undang waktu rapat mereka tidak datang itu karena masih merasa letih. Humam (2003:212) mengatakan bahwa pekerjaan memang secara tidak langsung turut

andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan proses pertukaran informasi, hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

- 4) Usia. Semakin tua usia seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Selain itu Ahmadi (2001:201) juga mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Pemahaman masyarakat mengenai Program Dana Desa di Desa Netutnana tidak berpengaruh pada usia seseorang atau masyarakat.
  - 5) Pengalaman. Selain faktor usia, pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.
  - 6) Jenis kelamin. Menurut Michael (dalam Sudaryanto 2009: 29) mengatakan bahwa ada perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan. Secara garis besar perbedaan yang dikatakan dalam buku tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman cepat dibandingkan laki-laki. Namun berbeda halnya dengan perempuan yang ada di Desa Netutnana karena faktor pendidikan yang rendah maka pemahaman masyarakat terhadap Program Dana Desa sangat kurang. Selain itu faktor kurangnya pemerintahan Desa dalam mensosialisasikan Program tersebut. Adapun beberapa masyarakat yang memahami program tersebut itu mendapat informasi dari kawannya yang mengerti namun tidak memahami sepenuhnya program Dana Desa.
- b. Faktor Eksternal. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak yang menjadi stakeholder dengan partisipan yang dapat mempengaruhi partisipasi karena partisipan akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan yang diinstruksikan stakeholder, jika sambutan dari pihak stakeholder positif dan dianggap menguntungkan partisipan. Selain itu bila didukung dengan pelayanan stakeholder yang positif dan tepat dibutuhkan oleh partisipan, maka partisipan tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi partisipan adalah masyarakat yang ada di Desa Netutnana dan yang menjadi stakeholder adalah orang-orang yang berada pada pemerintahan Desa Netutnana yang berpengaruh besar dalam pemberdayaan desa. Dibawah ini akan dibahas mengenai faktor eksternal dari Informan penelitian yaitu mengenai tingkat intensitas interaksi antara pemerintah dengan Informan dan mengenai bagaimana tingkat transparansi pemerintah dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan kepada Informan yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Netutnana.
- 1) Tingkat Intensitas Interaksi. Tingkat intensitas interaksi disini diartikan tingkatan proses komunikasi yang pemimpin lakukan kepada masyarakat di Desa Netutnana dalam kurun waktu tertentu. Tingkat intensitas interaksi ini diantaranya dilihat dari tingkat keseringan pemerintah dalam menemui, berinteraksi, bertanya mengenai pemberdayaan dan mengikuti kegiatan masyarakat. Mayoritas Informan merasa tingkat intensitas interaksi yang dilakukan pemerintah desa terbilang jarang sekali.
  - 2) Kepemimpinan Pemerintah Desa. Partisipasi masyarakat dan pemberdayaan di Desa Netunana pada khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena masyarakat merupakan panduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan. Dan di Desa Netutnana dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa factor kepemimpinan tidak dimiliki oleh Kepala Desa.



## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan dengan judul Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa netutnana kecamatan amanaun selatan kabupaten Timor Tengah Selatan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan dilihat dari beberapa tahap yaitu: a. Tahap Perencanaan; b. Tahap pelaksanaan; c. Tahap evaluasi. Dimana masyarakat desa netutnana sangat antusias untuk berpartisipasi serta mendukung setiap program pemerintah dalam program pemberdayaan.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:
  - a. Faktor Internal: Pendidikan, Status kependudukan, Pekerjaan, Usia, Jenis kelamin dan pengalaman
  - b. Faktor Eksternal: Tingkat Intensitas Interaksi, dan Kepemimpinan Pemerintah Desa

## **Daftar Rujukan**

- Arsiyah. 2009. Pemberdayaan Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Wacana* Vol. 12(2) Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta: 2004
- Anita, Fauziah. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI, Malang
- Ayub, M. Pandangan. 2011. *Managemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, Universitas Haluoleo: Unhalul Press 2011 [Desanaurang.blogspot.co.id](http://Desanaurang.blogspot.co.id)
- Edi, Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ginandjar, Kartasasmita. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Reneka.
- Gunawan, Sumodiningrat. 2009. *Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Radika Aditama
- Haris, Herdiansyah. 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ibrahim. 1998. *Inovasi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan P2LPTK
- M, Rinaldi Aulia. 2016. *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng* (Studi Kasus Pada Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).
- Made, Pidarta. 2009. *Supervisi Pendidikan Kontekstual*. Jakarta: Rineka cipta
- Ndaraha, T. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Soekanto. 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet M. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Planologi UNDIP. Semarang
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

## **Peraturan-peraturan :**

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Penerbit: Lakspendam PBNU, 2014
- Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 tentang desa, Penerbit: Visimedia, 2016
- Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 Penerbit: Visimedia, 2016
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Penerbit: Lakspendam PBNU, 2014
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sumber pendapatan desa Penerbit: Lakspendam PBNU, 2014